



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Agustus 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET HARYANTO**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **746088**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m²/246 m² di KAB / KOTA REMBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/162 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m²/153 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m²/179 m² di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m²/153 m² di KAB / KOTA JEPARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 35.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 606 m²/606 m² di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 422 m²/422 m² di KAB / KOTA JEPARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 43.000.000**

1. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 29.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 8.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 10.600.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	412.100.000
III. HUTANG	Rp.	34.398.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	377.701.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.